

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Di Indonesia dalam upaya meningkatkan pembangunan pada bidang ekonomi, ada tiga pelaku ekonomi yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi. Ketiga pelaku ekonomi dituntut untuk bekerja secara efektif, efisien dan produktif agar dapat meningkatkan pembangunan ekonomi nasional dengan baik. Pembangunan ekonomi nasional didasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 33 ayat 1 yang berbunyi **“Perekonomian Disusun Sebagai Usaha Bersama Berdasar Atas Asas Kekeluargaan”**. Dalam pasal tersebut terdapat penjelasan bahwasannya koperasi merupakan badan usaha yang sesuai sebagaimana yang telah disebutkan juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Bab II Pasal 3 yaitu **“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”**.

Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat 1 **“Koperasi adalah badan hukum usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang**

**berlandaskan atas asas kekeluargaan”.** Definisi tersebut menjelaskan bahwasannya koperasi merupakan suatu bentuk organisasi yang dimiliki oleh anggota-anggotanya dan berkegiatan secara demokratis. Maka dari itu untuk mencapai tujuan koperasi sangatlah diperlukan pengelolaan yang baik dan benar. Dalam kegiatannya, koperasi harus melaporkan dan mempertanggung jawabkan kegiatan dan hasil yang diperoleh khususnya laporan pengurus kepada anggotanya melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilaksanakan setiap akhir tahun, salah satunya adalah dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan dijadikan dasar oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan baik itu saat sekarang ataupun dimasa yang akan datang. Maka dari itu dalam penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku karena akan menghasilkan informasi yang akurat dan pengelolaan data secara tepat dan cepat. Hal itu juga akan menghasilkan kualitas laporan keuangan koperasi dengan hasil yang maksimal guna mencapai tujuan koperasi itu sendiri.

Penyusunan laporan keuangan membutuhkan suatu pedoman agar laporan keuangan dapat disusun dengan peraturan yang berlaku sehingga mempermudah para anggota atau yang berkepentingan lain memahami laporan keuangannya. Pedoman penyusunan laporan keuangan berupa standar akuntansi salah satunya adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tentang Akuntansi Perkoperasian. SAK-ETAP dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk

tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal . SAK-ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK-ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis: mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relative tidak berubah selama beberapa tahun (Ikatan Akuntan Indonesia). Berdasarkan SAK-ETAP, laporan keuangan yang lengkap itu meliputi: (a) neraca, (b) laporan laba rugi, (c) laporan perubahan ekuitas, (d) laporan arus kas, (e) catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelas lainnya. Laporan keuangan lengkap berarti bahwa suatu entitas harus menyajikan minimum dua periode dari setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait (IAI, 200:17-18).

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 12 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Rill pasal 3 ayat 1 mengemukakan bahwa **“Koperasi sektor riil yang tidak memiliki akuntabilitas publik, maka dipersyaratkan laporan keuangannya mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). ”** Namun pada SAK-ETAP masih adanya ke tidak sesuaian penamaan Laporan Laba Rugi dengan jati diri koperasi sehingga Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 12 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Rill pada Bab III tentang Laporan keuangan menyesuaikan

komponennya menjadi Perhitungan Hasil Usaha. Ketentuan dalam penyajian laporan keuangan antara lain adalah “Komponen laporan keuangan sektor riil, berupa: 1) Neraca, 2) Perhitungan Hasil Usaha, 3) Laporan Perubahan Ekuitas, 4) Laporan Arus Kas dan 5) Catatan Atas Laporan Keuangan”. yang dimana hal tersebut akan berpengaruh kepada kepercayaan anggota yaitu anggota memberikan modal untuk koperasi jika penyusunan laporan keuangan koperasi sudah sesuai dengan peraturan standar yang ditetapkan dan hal itu akan menghasilkan laporan keuangan yang mudah dipahami oleh pengguna, hasil yang relevan dengan kebutuhan penggunanya, hasil yang berkualitas. Yakni bebas dari kesalahan material, hasil informasi yang disampaikan secara lengkap, dan juga hasil yang dapat dibandingkan untuk membandingkan dengan periode-periode sebelumnya agar dapat mengevaluasi kinerja kedepannya

Primer Koperasi (PrimKop) Kartika Viyata Virajati Seskoad Bandung merupakan badan usaha Koperasi di lingkungan Seskoad, yang berkedudukan di luar struktur organisasi TNI AD, yang bertugas pokok melaksanakan upaya, pekerjaan, dan kegiatan usaha serta pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi guna membina dan mendukung serta mewujudkan kesejahteraan anggotanya dan juga diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan para anggotanya. Primer Koperasi Kartika Viyata Virajati Seskoad Bandung menyediakan beberapa unit usaha yaitu : 1. Unit Simpan Pinjam, 2. Unit Usaha Pertokoan (NIAGA), 3. Unit Usaha Alat Tulis Kantor (ATK), dan 4. Unit Usaha Kerjasama/Sewa. Anggota koperasi berjumlah 652 orang pada data terakhir Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2022 yang terdiri dari Anggota militer, Anggota

PNS (Pegawai Negri Sipil), dan Karyawan. Koperasi menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus atas penyelenggaraan kegiatan koperasi selama satu tahun. Laporan keuangan yang disusun oleh Primkop Kartika Viyata Virajati Seskoad Bandung meliputi neraca dan laporan laba rugi. Laporan keuangan tersebut disusun untuk satu periode akuntansi yang berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya.

**Tabel 1. 2 Laporan Keuangan Dalam Laporan Pertanggungjawaban pada RAT Primkop Kartika Viyata Virajati Seskoad Bandung pada Tahun 2021 dan Tahun 2022**

Berdasarkan SAK-ETAP	Keadaan Koperasi	
	Tahun 2021	Tahun 2022
Neraca	Neraca sudah di gabung dari ke 4 Unit yang ada pada Koperasi	Neraca sudah di gabung dari ke 4 Unit yang ada pada Koperasi
Laporan Laba/Rugi	Sudah ada pelaporan Laporan Laba/Rugi pada Laporan Keuangan Koperasi	Sudah ada pelaporan Laporan Laba/Rugi pada Laporan Keuangan Koperasi
Laporan Perubahan Ekuitas (Modal)	Tidak adanya penerapan pelaporan Laporan Perubahan Ekuitas (Modal) pada Laporan Keuangan Koperasi	Tidak adanya penerapan pelaporan Laporan Perubahan Ekuitas (Modal) pada Laporan Keuangan Koperasi
Laporan Arus Kas	Tidak adanya penerapan pelaporan Laporan Arus Kas pada Laporan Keuangan Koperasi	Tidak adanya penerapan pelaporan Laporan Arus Kas pada Laporan Keuangan Koperasi
Catatan Atas Laporan Keuangan	Tidak adanya penerapan pelaporan Catatan Atas Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan Koperasi	Tidak adanya penerapan pelaporan Catatan Atas Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan Koperasi

*Sumber: LPJ RAT Tahun 2021-2022 Primkop Koperasi Kartika Viyata Virajati*

Pada Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2021 dan Tahun 2022 Primer Koperasi Kartika Viyata Virajati Seskoad Bandung hanya menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi/laba saja. Untuk Laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan koperasi itu belum disusun. Dari hasil pengamatan atau observasi awal penulis terhadap penyajian laporan keuangan Primkop Kartika Viyata Virajati Seskoad Bandung, ada beberapa hal yang dianggap belum sesuai dengan SAK ETAP. Hal tersebut antara lain Primkop Kartika Viyata Virajati Seskoad Bandung hanya menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi saja. Sedangkan menurut SAK ETAP, laporan keuangan koperasi yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini dapat mengakibatkan adanya kesalahan dalam interpretasi atas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Namun pada pedoman SAK-ETAP ada suatu hal yang tidak sesuai dengan Jati Diri koperasi yaitu dalam penamaan Laporan Laba Rugi yang seharusnya pada koperasi adalah Perhitungan Hasil Usaha. Maka pemerintah melengkapinya dengan adanya Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 12 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Rill yang dimana kekurangan dari SAK-ETAP di lengkapi dan disesuaikan juga di Permenkop tersebut. Maka dari itu Primer Koperasi Kartika Viyata Virajati Seskoad juga belum menyesuaikan penamaan Laporan Laba Rugi dengan Perhitungan Hasil Usaha sesuai dengan Jati Diri Koperasi. Adapun hal lain yang belum sesuai pada Primer Koperasi Kartika Viyata

Virajati Seskoad yaitu dasarnya belum menggunakan Dasar Akrual, yang dimana seharusnya disesuaikan dengan Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 12 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Rill dan SAK-ETAP yaitu Entitas harus menyusun laporan keuangan, dengan menggunakan *Accrual Basic*, kecuali laporan arus kas. Basic yang digunakan koperasi masih menggunakan *Cash Basic* yang dimana hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas saja. Jadi meski ada transaksi yang terjadi namun uangnya diterima nanti, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat dan tidak dianggap sebagai pendapatan yang mengakibatkan tidak mudah untuk mengukur asset, kewajiban dan ekuitas juga sulitnya bagi manajemen untuk menetapkan suatu kebijakan ke depannya karena selalu berpatokan kepada kas.

Sebagai tolak ukur permasalahan yang ada, dalam penelitian (Iftitah Khiyatur Rohmah, 2020) yang berjudul “Implementasi Penyajian Laporan Keuangan Berbasis SAK-ETAP Pada Koperasi Serba Usaha Dian Pancasila Kabupaten Jember” disimpulkan bahwa Implementasi pada koperasi tersebut masih ada beberapa komponen SAK-ETAP yang tidak dipatuhi oleh KSU Dian Pancasila Kab. Jember. Dilihat dari lapangan koperasi ini hanya menyusun tiga jenis laporan keuangan, yakni neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Sehingga kesesuaian dalam penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-ETAP jika dipresentasikan mencapai 65%. Hal ini akan berdampak pada perkembangan koperasi, karena laporan keuangan ini tidak hanya digunakan oleh pihak internal saja namun juga pihak eksternal. Pihak eksternal seperti calon anggota dan pihak

ketiga. Pihak ketiga inilah yang nantinya dapat memberikan pinjaman modal sehingga koperasi bisa lebih berkembang berkat suntikan modal tersebut.

Dalam Jurnal (Kumala Sari Hafid, Ernawati Malik, Husnah Katjina, 2019) disimpulkan pada penelitiannya bahwa penyajian laporan keuangan Koperasi Serba Usaha Sang Zufikar telah memuat penilaian dan penyajian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan pada unsur-unsur laporan keuangan, Namun ada beberapa penilaian dan penyajian yang belum sesuai dengan penerapan SAK ETAP diantaranya penyajian akun kas dan bank disajikan secara terpisah pada neraca Koperasi Serba Usaha Sang Zulfikar; belum dibuatnya laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas; serta penyusunan neraca atau laporan posisi keuangan, perhitungan sisa hasil usaha atau laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP Tahun 2009.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan dengan hasil dan permasalahan yang ada di lapangan, bahwa penyusunan laporan keuangan dengan mengikuti standar yang ada akan menghasilkan peningkatan dalam kualitas laporan keuangan, hal itu penting yang akan berdampak pada kemajuan dan perkembangan koperasi. Dengan mengacu pada standar akuntansi yang ada, maka diharapkan dari segi pelaporan keuangan maupun pelaksanaan aktifitasnya, koperasi dapat bertindak lebih efisien dengan suatu tingkat keseragaman dari segi perlakuan akuntansinya, jika tidak maka sebaliknya. Maka dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA**

## **AKUNTABILITAS PUBLIK PADA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI”**

(Studi Kasus di Primer Koperasi Kartika Viyata Virajati Seskoad Bandung).

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis lakukan, maka ditemukan masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penerapan laporan keuangan pada Primer Koperasi Kartika Viyata Virajati Seskoad Bandung Tahun 2021 dan 2022 ?
2. Bagaimana Implementasi SAK-ETAP di penyajian laporan keuangan pada PrimKop Kartika Viyata Virajati Seskoad Bandung Tahun 2021 dan 2022 ?
3. Bagaimana Manfaat Berdasarkan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pada Koperasi?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian dari identifikasi, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk memahami, mempelajari, memperoleh data, dan menganalisa bagaimana dengan penerapan pelaporan keuangan pada Primkop Kartika Viyata Virajati Seskoad Bandung yang berkaitan dengan kesesuaian pada laporan keuangan yang berlaku.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa :

1. Penerapan laporan keuangan yang ada pada Primkop Kartika Viyata Virajati Seskoad Bandung pada tahun 2021 dan Tahun 2022

2. Implementasi SAK-ETAP di laporan keuangan pada Primkop Kartika Viyata Virajati Seskoad Bandung pada tahun 2021 dan Tahun 2022
3. Manfaat Bedasarkan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pada Koperasi

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan bagi aspek teoritis maupun aspek guna laksana yang dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah :

- a. Menambah atau memberikan pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenai Implementasi penerapan laporan keuangan menurut SAK ETAP tentang pedoman akuntansi perkoperasian.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau sebagai referensi untuk menambah pengetahuan pada penelitian selanjutnya pada koperasi. Serta sebagai pedoman Pustaka untuk penelitian lebih lanjut lagi.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah :

- a. Peneliti

Sebagai wadah untuk menambah wawasan atau pengetahuan, dan juga pengalaman tentang ilmu Akuntansi Keuangan Khususnya pada standar akuntansi keuangan dalam penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP tentang pedoman akuntansi perkoperasian..

- b. Koperasi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak koperasi dalam upaya meningkatkan standar akuntansi keuangan dalam penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP tentang pedoman akuntansi perkoperasian..